

**Analisis Peran Program Menengah Universal  
Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat  
Dalam Pembangunan Pendidikan dan Pemerataan  
Distribusi Pendidikan di Jawa Tengah**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**SEPTA PUTRA**  
**NIM. C2B 009 034**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2015**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Septa Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B009034  
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi Studi  
Pembangunan  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERAN PROGRAM MENENGAH  
UNIVERSAL TERHADAP PENINGKATAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN  
PEMERATAAN DISTRIBUSI PENDIDIKAN  
DI JAWA TENGAH**  
Dosen Pembimbing : Banatul Hayati, S.E., M.Si.

Semarang, 22 Juni 2015

Dosen Pembimbing

Banutul Hayati, S.E., M.Si

NIP. 196803161998022001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Septa Putra

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009034

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP

Judul Skripsi : **Analisis Peran Program Menengah Universal  
Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat  
Dalam Pembangunan Pendidikan dan Pemerataan  
Distribusi Pendidikan di Jawa Tengah**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 Juni 2015**

Tim Penguji

1. Banatul Hayati, S.E., M.Si. (.....)

2. Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS. (.....)

3. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si. (.....)

Mengetahui Pembantu Dekan I,

Anis Chariri., S.E., M.Com., Ph.D., Akt  
NIP. 19670809 199203 10001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Septa Putra, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Peran Program Menengah Universal Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan dan Pemerataan Distribusi Pendidikan di Jawa Tengah** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemungkinan terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Juni 2015

Yang membuat pernyataan,

(Septa Putra)

NIM. C2B009034

## **ABSTRACT**

*One of the MDG goal on quality improvement human resources around the world are improving the quality of education. Government Efforts to improve the quality of education through the program intermediate universal. Targets of Universal Intermediate Program (PMU) is achieve APK 97 percent, APK reduce disparities and improve vocational services. The purpose of this study was projecting and analyzing the success of Universal Intermediate Programs held in province of central java in 2020.*

*Research method used is geometric projection method and descriptive statistics to calculate and projecting the value of APK, APK disparity was measured using a calculation the Lorenz curve and increase in vocational ministry in view using descriptive statistical methods.*

*The results showed that the implementation of universal intermediate program in Province of Central Java projected in 2020 managed to achieve the goals of Universal Intermediate Program, which increases the APK and improvement Universal Intermediate Program. However targets APK minimize disparities between districts / municipalities in Central Java has not been achieved in 2020.*

*Keyword : Universal Intermediate Program, Disparities, Vocational Services, Projection, Geometric, the Minimum Service Standard*

## ABSTRAK

Salah satu tujuan MDGs tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia diseluruh dunia yaitu peningkatan mutu pendidikan. Upaya Pemerintah meningkatkan mutu pendidikan melalui Program Menengah Universal. Sasaran dari Program Menengah Universal (PMU) adalah Mencapai APK 97 persen, memperkecil disparitas APK dan meningkatkan pelayanan vokasi. Tujuan Penelitian ini adalah memproyeksikan dan menganalisis keberhasilan Program Menengah Universal yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode proyeksi geometrik dan statistik deskriptif untuk menghitung dan memproyeksikan nilai APK, disparitas APK diukur menggunakan penghitungan Kurva *Lorenz* dan peningkatan pelayanan vokasi di lihat menggunakan metode statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Menengah Universal di Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan pada tahun 2020 berhasil mencapai sasaran Program Menengah Universal, yaitu meningkatkan APK dan peningkatan program menengah universal. Selanjutnya sasaran memperkecil disparitas APK antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berhasil dicapai pada tahun 2014 dengan Program Menengah Universal.

Kata kunci : Program Menengah Universal, Disparitas, Pelayanan Vokasi, Proyeksi, Geometrik, Standar Pelayanan Minimal

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena sungguh tanpa rahmat, karunia, nikmat sehat, serta hidayah-Nya penyelesaian skripsi ini akan terasa sangat berat. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan, dan dorongan tersebut sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayah Nya
2. Bapak Dr. Suharnomo, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Ibu Banatul Hayati, SE., M.Si., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis dan memberikan motivasi kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. H. Hadi Sasana, SE., M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang selalu memahami kesulitan mahasiswa dan membangkitkan semangat juang untuk menyelesaikan studi.

5. Semua Dosen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
6. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan segenap jajarannya. Terima kasih atas bantuan perizinan data dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ketiga Orang Tua yang telah menjadi orang tua terbaik bagi penulis. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa baik dari segi materi, kasih sayang, semangat, doa, dan tauladan. Terima kasih Ayah, Ibu, dan Bunda yang selalu menjadi tempat bercerita dan menjadi penyemangat di kala penulis putus asa. semoga anakmu menjadi orang berhasil dan bermanfaat bagi sesama muslim, bangsa, dan negara.
8. Eka Puspita Sari, Satria Putra, Rivaldo Putra dan Nurrima Putri Nabila yang merupakan saudara-saudara kandungku tercinta. Terima kasih atas dukungan moral, kasih sayang dan doa yang dicurahkan kepada penulis selama ini.
9. Seluruh keluarga besar IESP 2009 yang memberikan dukungan kepada penulis. Terima kasih atas kesempatan dan pengalaman-pengalaman hebat yang takkan terlupakan.
10. Segenap staf dan karyawan FEB UNDIP atas bantuannya dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.



Tak ada kata yang dapat diucapkan selain banyak terima kasih atas keikhlasan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 22 Juni 2015

Penulis,

Septa Putra

NIM. C2B009034

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	13
1.5. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Landasan Teori .....	16
2.1.1 Definisi Pendidikan.....	16
2.1.2 Indikator Pendidikan.....	18
2.1.3 Modal Manusia (Human Investmen) .....	23
2.1.4 Pengertian Penduduk .....	25
2.1.5 Konsep dan Kebijakan PMU .....	26
2.1.5.1 Sasaran PMU .....	29
2.1.5.2 Strategi Pencapaian PMU .....	31
2.1.5.3 Tren PMU .....	32
2.1.5.4 Kebijakan PMU .....	34
2.1.5.5 Konsep PMU di Indonesia.....	36
2.1.6 Peran Pemerintah dalam Pendidikan .....	39
2.1.6.1 Peran Pemerintah Terhadap PMU .....	42
2.1.6.2 Peran Pemerintah Pusat Terhadap PMU.	43
2.1.6.3 Peran Pemerintah Provinsi Terhadap	
PMU .....	43
2.1.6.4 Peran Pemerintah Kabupaten dan Kota	
terhadap PMU .....	44
2.1.7 Standar Pelayanan Minimal di Bidang	
Pendidikan.....	44
2.2. Penelitian Terdahulu .....	46
2.3. Kerangka Pemikiran .....	48
BAB III. METODE PENELITIAN .....	49

3.1.	Variabel dan Definisi Operasional Variabel .....	49
3.2.	Jenis dan Sumber Data.....	51
3.3.	Metode Analisis .....	52
3.3.1	Metode Matematik.....	52
3.3.2	Kurva Lorenz .....	57
3.3.3	Gini Coefficient.....	58
3.4.	Analisis Keberhasilan Pendidikan Vokasi.....	59
3.4.1	Statistik Deskriptif .....	59
<b>BAB IV.</b>	<b>HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>63</b>
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian .....	63
4.1.1	Kondisi Geografi dan Administrasi Povinsi Jawa Tengah.....	63
4.1.2	Keadaan Sosial Ekonomi.....	64
4.1.3	Kondisi Demografi Provinsi Jawa Tengah.....	66
4.2.	Kondisi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Indikator MDG's .....	68
4.3.	Kondisi Awal APK SM Kabupaten/Kota Jawa Tengah.....	72
4.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK ).....	72
4.3.2	Kondisi Awal Disparitas APK SM antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.....	74
4.3.3	Disparitas APK SM antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	72
4.4.	Hasil dan Pembahasan .....	73
4.4.1	Hasil Proyeksi APK SM Tanpa Adanya PMU 2013 - 2020.....	75
4.4.2	Disparitas APK SM Tanpa Adanya PMU Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	78
4.4.3	Hasil Proyeksi APK SM Dengan Adanya PMU tahun 2013-2020.....	80
4.4.4	Disparitas APK SM Dengan Adanya PMU Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.....	85
4.4.5	Peningkatan Pelayanan Pendidikan.....	88
4.4.5.1	Perkembangan SMA/SMK/MA....	88
4.4.5.2	Rasio Ketersediaan Sekolah .....	89
4.4.5.3	Rasio Guru terhadap murid .....	89
4.4.5.4	Rasio Guru terhadap murid per kelas ....	90
4.4.5.5	Angka Putus Sekolah dan lulus .....	90
4.4.5.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ...	91
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
5.1	Kesimpulan.....	93
5.2	Keterbatasan .....	94
5.3	Saran.....	94
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah (APK SM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2013 .....	6
Tabel 1.2.	Perkembangan IPM Jawa Tengah Tahun 2010 - 2012 .....	8
Tabel 1.3.	Persentase Penduduk Usia Sekolah menurut jenjang pendidikan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2012 .....	9
Tabel 1.4.	Persentase Ketersediaan Fasilitas Milik SMK Tahun 2011 di Provinsi Jawa Tengah.....	10
Tabel 4.1	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah (APK SM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012.....	73
Tabel 4.2	Proyeksi APK SM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2020 Tanpa Adanya PMU di Jawa Tengah .....	76
Tabel 4.3	Proyeksi APK SM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2020 Dengan Adanya PMU di Jawa Tengah.....	81
Tabel 4.4	Data Perkembangan SMA/SMK/MA di Jawa Tengah Tahun 2011-2013.....	88
Tabel 4.5	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap 10.000 Jumlah Penduduk SM di Jawa Tengah .....	89
Tabel 4.6	Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan SM di Jawa Tengah Tahun 2011-2013.....	89
Tabel 4.7	Rasio Guru Terhadap Murid per kelas jenjang pendidikan SM di Jawa Tengah Tahun 2011-2013.....	90
Tabel 4.8	Apts,Angka Lulus, dan Angka Melanjutkan Pada Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.....	90
Tabel 4.9	Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011-2013.....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Tahun Penerimaan APK di Indonesia .....	5
Gambar 1.2	Perkembangan IPM Kota Semarang tahun 2010 - 2012 .....	8
Gambar 1.3	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah (APK SM) Tahun 2010 – 2020 di Kota Semarang .....	9
Gambar 2.1	Strategi Program Menengah Universal.....	31
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran .....	48
Gambar 3.1	Kurva Lorenz APK SM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 .....	57
Gambar 4.1	Peta Administratif Provinsi Jawa Tengah .....	66
Gambar 4.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SM di Jawa Tengah Tahun 2010-2012.....	67
Gambar 4.3	Perkembangan Angka rata-rata Lama Sekolah di Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	69
Gambar 4.4	Perbandingan Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SM di Jawa Tengah dan Kota Semarang tahun 2008-2012.....	70
Gambar 4.5	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) .....	71
Gambar 4.6	Ukuran Ketimpangan Penyerapan Penduduk Usia Sekolah SM Tahun 2012 di Jawa Tengah.....	74
Gambar 4.7	Ukuran Ketimpangan Penyerapan Penduduk Usia Sekolah SM Tanpa Adanya PMU tahun 2014 .....	79
Gambar 4.8	Angka Putus Sekolah (APts) Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 .....	83
Gambar 4.9	Persentase Penduduk Usia Sekolah 16-18 tahun yang bersekolah dan tidak bersekolah jenjang pendidikan SM di Jawa Tengah .....	84
Gambar 4.10	Ukuran Ketimpangan Penyerapan Penduduk Usia Sekolah SM dengan adanya PMU tahun 2014.....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Analisis Kurva Lorenz Pada Tahun 2012 Sebelum Adanya PMU di Jawa Tengah.....	100
Lampiran 2	Analisis Kurva Lorenz Pada Tahun 2014 Tanpa Adanya PMU di Jawa Tengah.....	101
Lampiran 3	Analisis Kurva Lorenz Pada Tahun 2014 Dengan Adanya PMU di Jawa Tengah .....	102
Lampiran 4	Hasil Analisis Kurva Lorenz Pada Tahun 2012, 2014 Tanpa PMU dan 2014 Dengan PMU.....	103
Lampiran 5	Tabel 4. Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Usia 16 – 18 Tahun Di Provinsi Jawa Tengah.....	105
Lampiran 6	Tabel 5. Proyeksi Jumlah Murid Tahun 2010 – 2020 Tanpa Adanya PMU di Provinsi Jawa Tengah.....	107
Lampiran 7	Tabel 6. Proyeksi Jumlah Muriid Tahun 2010 – 2020 Dengan Adanya PMU di Provinsi Jawa Tengah.....	109
Lampiran 8	Tabel 7. Jumlah Siswa Yang Harus Ditambah Setiap Tahunnya setiap Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.....	111
Lampiran 9	Tabel 8. Proyeksi APK SM di Jawa Tengah Tanpa PMU.....	113
Lampiran 10	Tabel 9. Proyeksi APK SM di Jawa Tengah Dengan PMU.....	115

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor pendorong dalam proses pembangunan suatu Negara, karena penduduk bisa berperan sebagai penggerak dan pengembang teknologi juga sebagai pasar bagi produk barang dan jasa yang dihasilkan. Namun perkembangan jumlah penduduk bila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dari SDM itu sendiri dapat menjadi penghambat proses pembangunan. Rendahnya kualitas SDM dapat menimbulkan masalah kemiskinan, diskriminasi, kriminalitas, kelaparan dan keterbelakangan. Menghadapi permasalahan tersebut Negara-negara didunia membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2015.

Salah satu kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia diseluruh dunia dengan agenda utama tersedianya akses pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Wiko Saputra (2013) menyatakan bahwa MDGs 2015 mengarah pada program wajib belajar Sembilan tahun, dimana Negara harus menyediakan kesempatan yang luas bagi anak usia 7-15 tahun untuk mendapatkan pendidikan, menghadapi MDGs

2015, bidang pendidikan di Indonesia harus berbenah diri, hal utama yang harus dilakukan adalah memperbaiki program wajib belajar dua belas tahun.

Pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2010 sampai pada tahun 2035 merupakan bonus demografi bagi Indonesia. Bonus demografi ini merupakan suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi usia muda sudah semakin kecil dan yang berusia lanjut belum banyak. Dwi hayati (2013) mengatakan bahwa diperkirakan oleh pemerintah tahun 2035 *working age* mencapai 70 persen dan *dependency rasio* mencapai 40 persen artinya pada tahun 2035 sekitar 7 orang produktivitas dengan 4 orang tidak produktivitas mampu menopang perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, namun apabila peningkatan jumlah penduduk tidak diiringi dengan peningkatan kualitas SDM maka bonus demografi tersebut akan menjadi ancaman besar bagi Negara, oleh karena itu kondisi pertumbuhan penduduk yang besar harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar tujuan dari bonus demografi dapat di capai.

Kualitas SDM di Indonesia relatif lebih redah dibandingkan Negara-negara lain di dunia. Kualitas penduduk di Indonesia dilihat berdasarkan indikator IPM berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2013 menunjukkan Indonesia berada pada urutan 108 dari 187 negara di dunia. Pada 2013, nilai IPM Indonesia adalah 0,684. Angka tersebut meningkat 0,003 poin dari tahun 2012, yakni 0,681. Dengan nilai 0,684, Indonesia berada dalam kategori negara dengan pembangunan manusia sedang.



Menurut Djibril Muhammad (2014) di tingkat ASEAN, Indonesia berada pada level di atas Myanmar, Laos, Kamboja, Timor-Leste, Vietnam dan Filipina, dan berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia serta Thailand (Beate, 2014). Beate menjelaskan, terdapat tiga dimensi utama yang digunakan sebagai dasar evaluasi IPM. Ketiga dimensi tersebut adalah 'hidup panjang yang sehat', 'akses terhadap ilmu pengetahuan', dan 'standard kehidupan yang layak'.

Kualitas SDM di Indonesia berdasarkan indikator IPM dimensi tingkat pendidikan menunjukkan masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada salah satu indikatornya yaitu tingkat partisipasi sekolah. Untuk pendidikan dasar, pendidikan di Indonesia masih tertinggal dengan beberapa Negara lain. Wiko Saputra (2013) menyatakan bahwa tingkat partisipasi sekolah untuk pendidikan dasar baru mencapai 85 persen sampai 94 persen. Untuk SMP masih berkisar 55 persen dan SMA baru mencapai 32 persen (Balitbang Diknas 2004). Bandingkan dengan Negara Malaysia yang telah mampu mewujudkan wajib belajar Sembilan tahun. Menghadapi MDGs 2015 hal utama yang perlu dilakukan adalah secara bertahap merancang program wajib belajar dua belas tahun.

*Millenium Development Goals* menggunakan beberapa indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu Negara dalam hal pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Untuk mencapai salah satu tujuan MDG'S yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan. Maka diperlukan upaya peran pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan SDM yang berkualitas di setiap daerah adalah melalui Program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Sasaran PMU adalah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi dengan memperbanyak SMK, maka diharapkan lulusan-lulusan di Indonesia akan memiliki SDM yang spesifik dan lebih siap untuk bekerja. Pendidikan vokasi diarahkan kepada pendidikan menengah kejuruan sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan lulusannya memasuki dunia kerja. Pembangunan pada sektor Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri sendiri serta sikap dan perilaku inovatif. Berdasarkan Permendiknas no 20 tahun 2003 Bab I pasal satu berbunyi :

*Sasaran penyelenggaraan PMU adalah setiap warga negara Indonesia usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97 % (sembilan puluh tujuh persen) pada tahun 2020.*

Dengan demikian sasaran PMU adalah menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah secara signifikan. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan



**Tabel 1.1**  
**Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah (APK SM) di**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2012**

	Kab/Kota	2010	2011	2012
1	Kab. Cilacap	53.26	59.35	58.70
2	Kab. Banyumas	75.73	72.28	74.23
3	Kab. Purbalingga	77.16	78.46	79.60
4	Kab. Banjarnegara	47.36	52.71	48.54
5	Kab. Kebumen	80.90	74.62	79.07
6	Kab. Purworejo	77.53	90.41	78.97
7	Kab. Wonosobo	45.38	50.16	50.41
8	Kab. Magelang	49.06	51.52	52.47
9	Kab. Boyolali	67.34	71.02	71.37
10	Kab. Klaten	77.10	78.80	84.68
11	Kab. Sukoharjo	73.94	66.24	79.61
12	Kab. Wonogiri	72.57	79.52	89.38
13	Kab. Karanganyar	58.71	53.51	62.83
14	Kab. Sragen	83.49	77.31	89.47
15	Kab. Grobogan	53.75	56.08	52.07
16	Kab. Blora	67.12	72.50	71.42
17	Kab. Rembang	50.23	53.53	50.07
18	Kab. Pati	48.60	55.19	51.75
19	Kab. Kudus	67.67	72.11	74.51
20	Kab. Jepara	39.47	39.61	51.85
21	Kab. Demak	33.10	39.51	35.04
22	Kab. Semarang	47.64	51.35	55.18
23	Kab. Temanggung	47.20	49.34	48.39
24	Kab. Kendal	60.12	61.68	73.26
25	Kab. Batang	36.25	35.48	50.03
26	Kab. Pekalongan	62.44	60.91	65.24
27	Kab. Pemasang	50.65	57.70	58.44
28	Kab. Tegal	71.20	71.91	69.92
29	Kab. Brebes	43.39	44.33	45.98
30	Kota. Magelang	114.58	108.20	122.44
31	Kota. Surakarta	113.35	108.38	119.39
32	Kota. Salatiga	112.52	105.90	124.45
33	Kota. Semarang	90.55	92.27	92.65
34	Kota. Pekalongan	65.21	71.44	81.89
35	Kota. Tegal	85.16	89.43	93.15
	Jawa Tengah	65.71	67.22	71.04

Sumber : Profil Pendidikan, Dinas Pendidikan Jawa Tengah (2013)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa nilai APK antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat nilai yang bervariasi. Pada tahun 2010 ada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang melebihi APK Jawa Tengah atau sebesar 48.57 persen dari jumlah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2010 terdapat tiga Kabupaten/Kota yang sudah mencapai APK 97 persen.

Pada tahun 2011 terdapat 17 Kabupaten/Kota yang APK nya melebihi APK Provinsi Jawa Tengah atau sebesar 48.57 persen dari jumlah Kabupaten/Kota, dimana APK Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 60.40 persen. Pada tahun 2011 juga terdapat tiga Kota yang telah melebihi target APK SM yaitu Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kota Salatiga.

Pada tahun 2012 terdapat 14 Kabupaten/Kota yang APK nya melebihi APK Provinsi Jawa Tengah atau sebesar 40.00 persen dari jumlah Kabupaten/Kota, dimana APK Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 61.28 persen. Apabila dilihat dari tabel 1.1 terjadi peningkatan pada tahun 2012 ke tahun 2013 khususnya APK Provinsi Jawa Tengah, secara otomatis meningkat pula tingkat rata-rata APK yang menyebabkan penurunan jumlah Kabupaten/Kota yang APK nya lebih dari APK Provinsi, dari 35 Kabupaten/kota terdapat 17 Kabupaten/Kota pada tahun 2010 kemudian masih 17 Kabupaten/ Kota di tahun 2011 dan terjadi penurunan pada tahun 2012 hanya terdapat 14 Kabupaten/Kota yang APK nya lebih dari APK Provinsi Jawa Tengah.

IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1.2. Hal ini dapat dilihat oleh besarnya IPM Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan IPM Jawa Tengah Tahun 2010-2012**  
**(dalam persen)**

No	Kabupaten/Kota	IPM 2010	IPM 2011	IPM 2012
1	Kab. Cilacap	71.73	72.34	72.77
2	Kab. Banyumas	72.60	72.96	73.33
3	Kab. Purbalingga	72.07	72.50	72.97
4	Kab. Banjarnegara	69.91	70.39	70.70
5	Kab. Kebumen	71.12	71.62	71.86
6	Kab. Purworejo	72.55	72.91	73.53
7	Kab. Wonosobo	70.52	71.06	71.45
8	Kab. Magelang	72.08	72.69	73.14
9	Kab. Boyolali	70.72	71.25	71.50
10	Kab. Klaten	73.83	74.10	74.46
11	Kab. Sukoharjo	73.57	73.97	74.21
12	Kab. Wonogiri	71.33	71.86	72.59
13	Kab. Karanganyar	73.19	73.82	74.62
14	Kab. Sragen	71.00	71.33	71.85
15	Kab. Grobogan	70.83	71.27	71.77
16	Kab. Blora	70.61	71.25	71.49
17	Kab. Rembang	72.07	72.45	72.81
18	Kab. Pati	72.96	73.49	73.81
19	Kab. Kudus	72.95	73.24	73.69
20	Kab. Jepara	72.64	73.12	73.54
21	Kab. Demak	72.58	73.09	73.52
22	Kab. Semarang	74.10	74.45	74.98
23	Kab. Temanggung	74.11	74.47	74.74
24	Kab. Kendal	70.41	70.85	71.48
25	Kab. Batang	70.41	71.06	71.41
26	Kab. Pekalongan	71.40	71.86	72.37
27	Kab. Pemasang	69.89	70.22	70.66
28	Kab. Tegal	70.59	71.09	71.74
29	Kab. Brebes	68.20	68.61	69.37
30	Kota Magelang	76.60	76.83	77.26
31	Kota Surakarta	77.86	78.18	78.60
32	Kota Salatiga	76.53	76.83	77.13
33	Kota Semarang	77.11	77.42	77.98
34	Kota Pekalongan	74.47	74.90	75.25
35	Kota Tegal	73.89	74.20	74.63
<b>36</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>72.47</b>	<b>72.91</b>	<b>73.35</b>

*Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Jateng, 2013.*

Pada gambar 1.2 besaran IPM di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 nilai IPM Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 72.47 persen dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 72.91 persen. Kemudian terjadi peningkatkan menjadi 73.35 persen pada tahun 2012. Pencapaian IPM Provinsi Jawa Tengah tersebut disebabkan oleh program Pendidikan Menengah Universal yang dicanangkan oleh Presiden pada tahun 2013 lalu. Peningkatan mutu pendidikan menjadi tujuan utama program tersebut.

**Tabel 1.3**  
**Persentase Penduduk Usia Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 - 2012 (dalam persen)**

<b>Jenjang Pendidikan Tahun</b>	<b>SD Umur 7-12</b>	<b>SMP Umur 13-15</b>	<b>SMA Umur 16-18</b>	<b>Universitas Umur 19-24</b>
2010	32.97	16.44	16.18	34.42
2011	31.80	15.87	15.88	36.44
2012	30.88	13.72	15.77	39.62

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional, BPS Jateng 2013, diolah

Dari Tabel 1.3 kita dapat melihat Persentase Penduduk Usia Sekolah Usia 19-24 tahun di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010 – 2012 terus mengalami peningkatan. Namun berbeda dengan tingkat Penduduk Usia Sekolah di Usia 7-12, Usia 13-15 dan Usia 16-18 tahun yang mengalami penurunan. Pada jenjang pendidikan menengah yaitu pada usia 16-18 tahun, penduduk usia sekolah di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dalam hal persentase terhadap penduduk usia sekolah semua jenjang. Ini tidak berarti bahwa jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang Menengah mengalami penurunan, namun bisa terjadi proporsi jumlah murid pada jenjang pendidikan lain yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Sasaran lain dari PMU yang akan dicapai adalah peningkatan pelayanan vokasi. Pelayanan vokasi meliputi peningkatan kualitas pelayanan keadaan fisik (bangunan) dan non fisik (system). Adapun peningkatan pelayanannya antara lain meningkatkan ketersediaan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga, buku pelajaran, guru yang tersedia, guru yang layak mengajar sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Ketersediaan fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan juga merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam upaya menunjang penyelenggaraan pendidikan vokasi di suatu wilayah. Dari tabel 1.4 akan menampilkan jumlah ketersediaan fasilitas SMK, jumlah murid dan jumlah guru antara Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 1.4**  
**Persentase Ketersediaan Fasilitas Milik SMK**  
**Tahun 2011 di Provinsi Jawa Tengah**

No	Fasilitas	Jumlah (persen)
1	Perpustakaan	83.15
2	Lap. OR	4.49
3	UKS	73.03
4	Laboratorium	244.94
5	Keterampilan	13.48
6	BP	86.52
7	Serba-guna	47.19
8	Bengkel	25.84
9	Ruang Praktik	244.94

*Sumber: Dikdasmen, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2012, diolah*

Pada tabel 1.4, fasilitas yang tersedia di Provinsi Jawa Tengah khususnya milik SMK dapat dilihat masih ada beberapa fasilitas yang belum memadai. Seperti halnya lapangan olah raga, hanya terdapat 4.49 persen sekolah SMK yang memiliki lapangan olah raga. Masih banyak sekolah SMK yang menggunakan



lapangan umum sebagai lapangan olah raga mereka. Di samping itu fasilitas bengkel juga masih kurang, yaitu hanya 25.84 persen yang memiliki fasilitas bengkel. Namun untuk Laboratorium dan Ruang praktik ternyata seluruh SMK di Semarang sudah memiliki dan bahkan mencapai lebih dari 200 persen.

Pendidikan yang bermutu merupakan landasan yang kokoh untuk memperkuat pengembangan mutu SDM di jenjang pendidikan berikutnya. Program Wajib Belajar 9 tahun yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan merupakan program sektor pendidikan yang dinilai cukup sukses dalam pelaksanaannya, namun tidak cukup sampai disini program wajib belajar 12 tahun harus dapat diwujudkan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi generasi muda calon tenaga kerja merupakan tanggung jawab dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Pertumbuhan penduduk yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi bencana bagi Indonesia jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah fokus dalam menyiapkan SDM yang berkualitas melalui Pendidikan Menengah Universal (PMU) dan Standar Pelayanan Minimal. PMU diharapkan mampu meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa dalam kancan persaingan globalisasi. Sasaran Pendidikan Menengah Universal adalah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan.

Berdasarkan data dari Kemendikbud Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah (APK SM) dibawah 97 persen. Dengan kebijakan pemerintah menyelenggarakan PMU maka pemerintah optimis mampu mencapai APK 97 persen dan dapat memperkecil disparitas APK SM antar daerah pada tahun 2020.

Provinsi Jawa Tengah sebelum diselenggarakannya PMU nilai APK masih rendah dan belum memenuhi target 97 persen APK dan data perkabupaten APK masih banyak yang masih dibawah APK 97 persen. dengan diadakannya PMU diharapkan target APK tersebut dapat dicapai pada tahun 2020.

Sehingga dari permasalahan tersebut dapat diberikan pertanyaan penelitian sbb;

1. Memproyeksikan serta membandingkan nilai APK tanpa ada PMU dan nilai APK bila adanya PMU di Provinsi Jawa Tengah.
2. Membandingkan disparitas APK di Provinsi Jawa Tengah tanpa adanya PMU dengan disparitas APK dengan adanya PMU.
3. Membandingkan pelayanan pendidikan sebelum adanya PMU dan setelah adanya PMU di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan latarbelakang masalah dan perumusan masalah yang ada maka penelitian ini berjudul “Analisis Peran Program Menengah Universal Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pendidikan dan Pemerataan Distribusi Pendidikan di Jawa Tengah”.

Dengan mengetahui berbagai permasalahan terjadi terkait dengan pelaksanaan pendidikan, diharapkan pemerintah pusat dan daerah mampu bersinergi dalam mengoptimalkan peran

nya dalam pelaksanaan PMU. Optimalisasi peran pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar formulasi penerapan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Membuat proyeksi nilai APK SM Jawa Tengah untuk membandingkan Nilai APK tanpa adanya PMU dan nilai APK dengan adanya PMU di Jawa Tengah.
2. Membandingkan disparitas APK tanpa adanya PMU dengan disparitas APK yang menggunakan PMU di Jawa Tengah.
3. Mengevaluasi peningkatan pelayanan pendidikan dengan membandingkan SPM SM sebelum adanya PMU dan setelah adanya PMU.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan kajian ilmu ekonomi. Sedangkan manfaat praktis yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis, khususnya pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, sebagai bahan studi dan tambahan

informasi dalam memahami lebih jauh mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Bagi pemerintah daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan atau program untuk sektor pendidikan pada periode berikutnya agar tercipta pendidikan yang ideal.
3. Bagi Dinas Pendidikan, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pendidikan khususnya pendidikan menengah.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah mengapa program pendidikan universal di Provinsi Jawa Tengah menarik untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan dalam meneliti.

#### **BAB II :Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi dasar penelitian, teori-teori yang digunakan merupakan teori yang berpijak pada ekonomi pendidikan maupun bahasan hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat menjadi dasar-dasar penelitian.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisikan dekripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis geometrik.

#### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini secara singkat menjelaskan keadaan wilayah Provinsi Jawa Tengah, perkembangan pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor pendidikan, kemudian pada besarnya biaya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan.

#### BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan berkaitan pembiayaan pendidikan menengah universal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Definisi Pendidikan dan Perannya Dalam Pembangunan**

Pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi ( United Nation, *Report on the world social situation*, 1997).

Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, menyerap dan menyebarluaskan pengetahuan ... namun akses pendidikan tidak tersebar secara merata, dan golongan miskin paling sedikit mendapat bagian ( World Bank, *World Development Report*, 1999).

Pendidikan adalah salah satu investasi sumber daya manusia (SDM) yang penting. Untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah tinggi, seseorang membutuhkan keterampilan (skill) yang memadai. Keterampilan yang memadai dapat diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan juga elemen penting dalam rangka memerangi kemiskinan, memberdayakan wanita, dan menyelamatkan anak-anak dari berbagai upaya eksploitasi (UNICEF). Gagasan bahwa investasi pendidikan memiliki manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang bagi individu maupun masyarakat luas sudah muncul pada masa Adam Smith bahkan sebelumnya (Center for the Study of Living Standards, 2001).

Pasaribu (2004), pendidikan merupakan suatu segi pembangunan dan pendidikan adalah investasi dalam pembangunan. Karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti pula berpartisipasi dalam usaha-usaha pendidikan.

Dalam UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut UU No.20 tahun 2003 jenjang pendidikan formal, yaitu:

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lainnya yang sederajat.
2. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum seperti Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan pendidikan menengah kejuruan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

### **2.1.2. Indikator Pendidikan**

Indikator merupakan besaran dari suatu keadaan empiris dari suatu konsep atau gejala tertentu sebagai hasil pengolahan dari dua satuan data atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Indikator juga diartikan sebagai perbandingan antara dua atau lebih variabel yang dapat diinterpretasikan. Data dan indikator tidak dapat dipisahkan bahkan saling berhubungan satu sama lain. Indikator juga tidak dapat dihasilkan tanpa dukungan data, sebaliknya data juga tidak memiliki acuan konseptual apapun tanpa dilakukannya definisi tentang indikator.

Indikator pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran dari proses pendidikan. Indikator pendidikan itu sendiri yang paling dasar adalah mengukur kemampuan seseorang dalam hal membaca dan menulis. Dalam hal ini membaca dan menulis merupakan dasar dari pendidikan seseorang, sebab kemampuan membaca dan menulis dapat menunjukkan tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang dalam berkehidupan. Berdasarkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam indikator pendidikan :

1. Angka Melek Huruf.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Formulasinya sebagai berikut.



$$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100 \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan:

$LIT_{15+}^t$  = Angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t

$L_{15+}^t$  = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t

$P_{15+}$  = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk: mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan dimana daerah pedesaan masih tinggi jumlah penduduk yang tidak bersekolah.

## 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Rata-Rata Lama Sekolah dapat dinotasikan sebagai berikut.

$$MYS = \text{tahun konversi} + (\text{kelas tertinggi yang pernah didudui} - 1) \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan:

MYS = Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

Tahun Konversi = Pendidikan yng ditamatkan; SD (6 tahun), SMP (9 tahun), SMA (12 tahun), D1 (13 tahun), D2 (14 tahun), D3 (15 tahun), D4/S1 (16 tahun), S2 (18 tahun), dan S3 (21 tahun)

Tingginya angka Rata-rata lama sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. UNDP

menetapkan standar Rata-rata Lama Sekolah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

### 3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA, dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada suatu daerah. Untuk mengetahui nilai dari APK dapat dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut.

$$APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100 \dots\dots\dots (2.3)$$

Keterangan:

h = Jenjang pendidikan

a = Kelompok usia

t = Tahun

$E_h^t$  = Jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usiasedang sekolah pada jenjang pendidikan h

$P_{h,a}^t$  = Jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h

Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Acapkali ditemukan APK yang lebih dari 100 persen. Jika nilai APK lebih dari 100 persen berarti ada

murid yang belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih daripada target yang sesungguhnya.

#### 4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Untuk mengukur APM dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut.

$$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100 \dots\dots\dots(2.4)$$

Keterangan:

h = Jenjang pendidikan

a = Kelompok usia

t = Tahun

$E_{h,a}^t$  = Jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t

$P_{h,a}^t$  = Jumlah penduduk kelompok usia a

Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 persen karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan.

## 5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APrS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Formulasi yang digunakan untuk menghitung APrS adalah sebagai berikut.

$$APrS_{h,a}^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 1.000 \dots \dots \dots (2.5)$$

Keterangan:

h = Jenjang pendidikan

a = Kelompok usia

t = Tahun

$E_{h,a}^t$  = Jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan pada tahun t

$P_{h,a}^t$  = Jumlah penduduk kelompok usia a

Makin tinggi APrS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APrS = 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

## 6. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APts) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan

dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APtS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Angka Putus Sekolah dinotasikan sebagai berikut.

$$\text{APtS} = \frac{\text{Jumlah capaian kinerja APS jenjang pendidikan tertentu} \times 100\% \dots (2.6)}{\text{Jumlah seluruh APS jenjang pendidikan tertentu se-kabupaten/kota}}$$

Semakin tinggi APS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Dengan mengetahui tingkat angkat partisipasi kita dapat menilai apakah sekolah, daerah, direktorat/departemen pendidikan tersebut mempunyai kualitas.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia terutama di bidang pendidikan. Indikator yang digunakan MDGs meliputi: Angka Partisipasi Murni di SMA. Sementara dalam perspektif UNDP (United Nation Development Program) indeks pendidikan diukur melalui kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah.

### **2.1.3. Modal Manusia (Human Investmen)**

Pendidikan merupakan *tujuan pembangunan* yang mendasar; terlepas dari hal-hal yang lain. Pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan memainkan peran yang utama dalam membantuk kemampuan sebuah negar berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu “*pendidikan dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi agregat*” (Michael P.Todaro, 2006)

Menurut Mankiw (2008), perkembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Dalam hal ini modal manusia dapat mengacu pada sektor pendidikan dan sektor lainnya. Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Menurut Meier dan Rauch (dalam Aloysius Gunadi Brata, 2002) pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini dikarenakan pendidikan pada dasarnya adalah modal manusia dalam upaya meningkatkan pembangunan.

Konsep tentang investasi sumber daya manusia (human investment) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (economic growth), sebenarnya telah mulai dipikirkan sejak jaman Adam Smith (1776), Heinrich Von Thunen (1875) dan para teori klasik lainnya sebelum abad ke 19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia. Pemikiran ilmiah ini baru mengambil tonggak penting pada tahun 1960-an ketika pidato Theodore Schultz pada tahun 1960 yang berjudul "Investment in human capital" dihadapan *The American Economic Association* merupakan peletak dasar teori human capital modern. Pesan utama dari pidato tersebut sederhana bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi.

Kemudian memperhatikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan dan cara pandang ini telah

mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan.

Alasan utama dari perubahan pandangan ini adalah adanya pertumbuhan minat dan interest selama tahun 1960-an mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Pada tahun 1962, Bowman, mengenalkan suatu konsep “revolusi investasi manusia di dalam pemikiran ekonomis”. Para peneliti lainnya seperti Becker (1993) dan yang lainnya turut melakukan pengujian terhadap teori human capital ini.

#### **2.1.4. Pengertian Penduduk**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi (BPS Jawa tengah).

(Thomas Robert Maltus, 1766) menyatakan bahwa penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan kelamin antar laki – laki dan perempuan tidak bisa dihentikan.

Disamping itu manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Apabila tidak ada pembatasan pertumbuhan penduduk maka manusia akan mengalami kekuarangan bahan makanan inilah sumber dan kemiskinan manusia.

Untuk dapat keluar dari permasalahan kekurangan pangan, pertumbuhan penduduk harus di batasi. Menurut Malthus pembatasan dapat dilakukan dua cara yaitu preventive checks dan positive checks. Preventive checks ialah pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran, sedangkan positive checks adalah pengurangan penduduk melalui proses kematian.

#### **2.1.5. Konsep dan Kebijakan Pendidikan Menengah Universal**

Todaro (2006), pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga karena pendidikan adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Pendidikan juga memberikan kontribusi pemecahan terhadap persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh masyarakat modern. Oleh karenanya, salah satu kebijakan dasar bangsa yang progresif, harus membangun, menyediakan, dan mendukung kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kekinian warga negaranya. (John dan Morphet, 1975)

Pembangunan pendidikan adalah salah satu agenda utama di dalam *Millenium Development Goals*, dengan memberi fokus perhatian kepada anak berusia 7-15 tahun untuk memperoleh kesempatan pendidikan secara merata. Pembangunan pendidikan sudah seharusnya diutamakan pada tingkat pendidikan dasar. Sebab investasi pendidikan dasar akan berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.



Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif adalah landasan kokoh pembangunan di segala sektor. Dibekali dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka bisa mengolah sumber daya alam dan kapital secara efisien untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Dengan begitu, diharapkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai terwujudnya kondisi kesejahteraan.

Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) telah diluncurkan pada 2013 lalu. Program PMU ini ditujukan untuk mendorong kenaikan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah. Target APK pendidikan menengah sebesar 97 persen diharapkan tercapai pada tahun 2020 dengan Program PMU. Tanpa upaya percepatan melalui PMU tersebut, target APK 97 persen baru bisa dicapai pada tahun 2040.

Istilah universal diambil untuk membedakan pengertian wajib belajar yang sudah dijalankan pada jenjang pendidikan dasar 9 tahun. Pengertian universal adalah konsep yang umum digunakan oleh badan dunia (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk memberikan pelayanan umum kepada publik, tanpa harus diminta, yang biasa disebut dengan istilah *public service obligation* (PSO). Sebuah bentuk pelayanan yang jauh lebih mulia karena tidak perlu diminta tapi disediakan atau dijalankan.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh (2012), Pendidikan Menengah Universal adalah nama lain dari Wajib Belajar 12 tahun. Menurutnya, kementerian tidak memakai kata wajib karena tidak ada yang mewajibkan. Berbeda dengan program wajib belajar 9 tahun yang merupakan

amanah dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana pada Bab VIII Pasal 34 berbunyi :

1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Jadi jelas, untuk Wajib Belajar 9 Tahun diatur dalam undang-undang, sementara Wajib Belajar 12 tahun belum ada undang-undangnya. Tujuan utama PMU adalah meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu sasarnya adalah pada tahun 2020 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sekurang-kurangnya mencapai 97 persen. Tanpa kebijakan PMU, skenario capaian sebesar APK 97 persen baru akan tercapai pada 2040. PMU dijalankan untuk menampung sebanyak mungkin para lulusan SMP agar bisa melanjutkan ke SMA/SMK.

Pendidikan Menengah Universal atau yang bisa disingkat dengan PMU dapat dikatakan sebagai *one step ahead*. Bagaimana tidak? Ide dasarnya pun sederhana, bahwasanya Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan sebuah lompatan yang sangat signifikan dalam layanan pendidikan kita.

Dengan adanya kesepakatan untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun pada tahun 2013, Dewan meminta Pemerintah menegerakan revisi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang:

*Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.*

Revisi yang diharapkan adalah bahwa setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun wajib mendapatkan pendidikan. Program wajib belajar 12 tahun ini sangat diharapkan oleh masyarakat luas terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mempersiapkan Wajar 12 Tahun atau yang lebih tepat disebut sebagai Pendidikan Menengah Universal (PMU), yaitu pendidikan menengah yang mencakup SMA, MA dan SMK. Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada dasarnya merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.

#### **2.1.5.1. Sasaran Pendidikan Menengah Universal**

Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun, yang ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Nama Pendidikan menengah Universal (PMU) diambil karena sebagai rintisan di mana belum adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Wajib Belajar 12 Tahun. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengamandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur soal wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun.

Ada tiga sasaran yang ingin dicapai melalui PMU, yaitu:

1. *Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah*

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SMA sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 sampai 18 tahun. Secara matematis ditulis:

$$APK = \frac{\text{Jumlah PUS di Kab /Kota X yang bersekolah (dimana saja)}}{\text{Jumlah PUS di Kab /Kota X}}$$

Catatan : Diperlukan data individual siswa

PUS = Penduduk Usia Sekolah

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu pendidikan. APK merupakan indicator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

2. *Memperkecil disparitas antar daerah*

Disparitas dapat diartikan dengan perbedaan. Jadi, memperkecil disparitas antar daerah dapat diartikan dengan memperkecil perbedaan antar daerah khususnya dalam bidang pendidikan.

3. *Memperkuat pelayanan pendidikan vokasi*

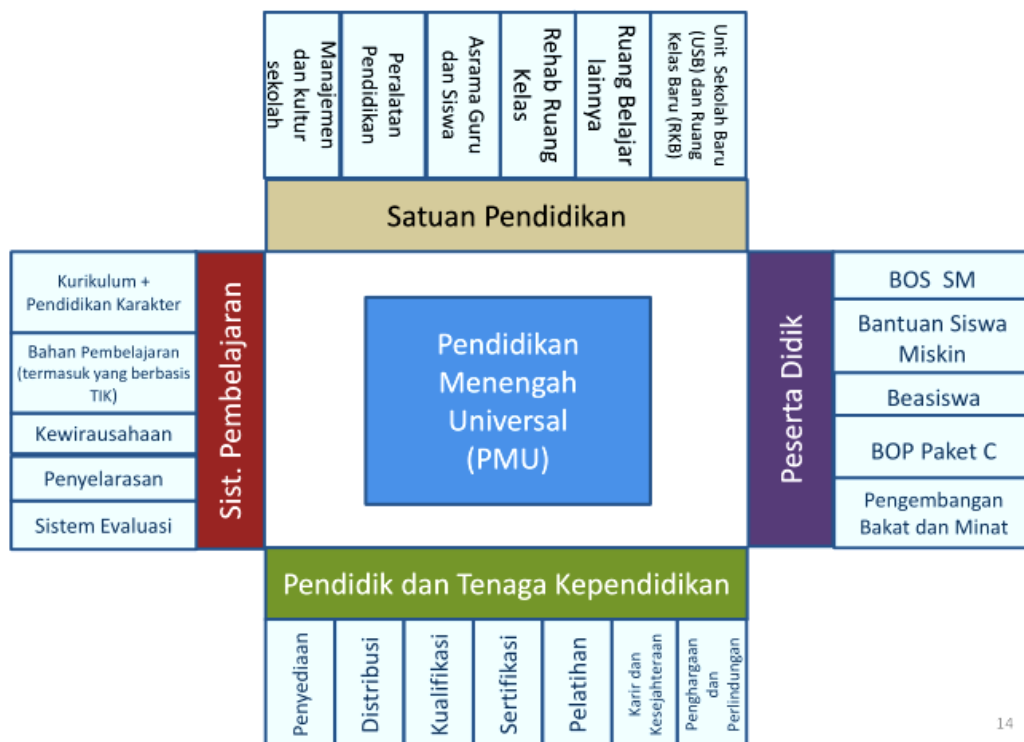
Istilah vokasi digunakan untuk program pendidikan menggantikan istilah profesional atau profesi. Istilah vokasi diturunkan dari bahasa

*Inggris, vocation*, yang sama artinya dengan *profession*. Di Amerika Serikat, vokasi digunakan untuk menyebut pengelompokan sekolah kejuruan seperti di Indonesia.

Melalui tiga sasaran tersebut di atas, diharapkan tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan menengah dapat lebih terfokus dan mengacu kepada tujuan umum pendidikan sebagai berikut: (1) meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut; dan (2) meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kompetensi kejuruannya (BSNP, 2006).

### 2.1.5.2. Strategi Pencapaian Pendidikan Menengah Universal

**Gambar 2.1**  
**Strategi Program Menengah Universal**



Strategi Pendidikan Menengah Universal (PMU) dapat di lihat pada Gambar 2.1. Dapat dilihat bahwa ada 4 strategi yang dilaksanakan pemerintah diantaranya ;

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- b. Peserta Didik
- c. Sistem Pembelajaran
- d. Satuan Pendidikan

Dari keempat strategi diatas memiliki beberapa sub misi yang akan dilakukan. Seperti peningkatan anggaran pendidikan sebagai penunjang pendidikan dan bantuan – bantuan berupa BOS ataupun buku pendidikan.

#### **2.1.5.3. Trend Pendidikan Menengah Universal**

Kebijakan Pendidikan Universal (PMU) sebagaimana yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2013 telah diusahakan oleh UNESCO sejak tahun 2000. Fokus utama UNESCO dalam pendidikan menengah yakni membantu negara-negara anggota mencapai Pendidikan Untuk Semua (Educationan for All).Tinjauan konseptual dan implementatif bahwa beberapa negara belum dapat memenuhi salah satu atau kedua tujuan dan menjadi model pendidikan menengah universal. Namun, sebagian besar pemerintah menyadari bahwa pendidikan menengah yang baik adalah salah satu yang berkaitan dengan pengembangan holistik dan pemberdayaan manusia dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Masalah ini melibatkan persiapan untuk hidup, dunia kerja dan untuk pendidikan tinggi. Tiga bidang fokus utama penyelesaian masalah adalah akses, kualitas dan relevansi.

Untuk membantu negara-negara anggota, UNESCO mengidentifikasi tren baru dan prioritas untuk mempromosikan pendidikan menengah, penelitian, pendekatan inovatif untuk menyebarkan informasi, mempromosikan dialog kebijakan dengan pengambil kebijakan pendidikan tingkat tinggi pemerintahan, dan pertemuan regional atau internasional. Selain itu, lembaga dunia ini juga menggunakan jaringan global, pengalaman dan keahlian untuk mempertemukan para pembuat kebijakan dan para ahli. Pelaksanaan PMU di negara-negara berkembang, seperti Uganda telah diperkenalkan sejak tahun 2007 sebagai tindak lanjut dari Pendidikan Dasar Universal dengan menghilangkan biaya pendidikan bagi siswa. Kebijakan PMU telah banyak memperluas akses pendidikan menengah bagi keluarga Uganda, termasuk beberapa warga miskin rentan yang tidak akan dan bahkan menganggap sekolah menengah merupakan sesuatu yang mustahil tanpa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Pada tahun 2000, masyarakat internasional pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal, menyatakan bahwa sesuai fakta masih banyak negara yang yang belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua. Para peserta menyepakati kerangka aksi Dakar yang kembali menegaskan komitmen mereka untuk mencapai pendidikan untuk semua pada tahun 2015, dan mengidentifikasi enam tujuan pendidikan kunci terukur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar semua anak, remaja dan orang dewasa pada tahun 2015. Selain itu, forum menegaskan kembali peran UNESCO sebagai organisasi memimpin dengan tanggung jawab keseluruhan koordinasi instansi dan organisasi lain dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Penyediaan pendidikan menengah berkualitas relevan dengan perubahan kebutuhan remaja dan masyarakat pada umumnya menjadi perhatian secara universal. The UIS Pembaca Digest (2005) melaporkan bahwa data 144 dari 183 negara memiliki pendidikan wajib menengah dengan pengecualian Asia Selatan dan Barat dengan tingkat partisipasi masing-masing 51.9 persen. Untuk tingkat partisipasi sekunder, kedua wilayah tersebut tertinggal dengan tingkat partisipasi hanya 40 persen sedangkan tingkat partisipasi universal 90 persen atau lebih di sebagian besar negara-negara di wilayah ini.

#### **2.1.5.4. Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU)**

Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memajukan dan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Peranan masyarakat sebagai pelaku utama pendidikan. Kesadaran masyarakat bahwa pendidikan bukan sekedar formalitas belaka namun mengerti dan memahami dengan benar bagaimana berinvestasi pada pendidikan. Peranan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pendidikan tidak akan maksimal tanpa partisipasi masyarakat didalamnya, mengingat adanya pemikiran yang berkembang dikalangan masyarakat untuk investasi di dunia kerja (bekerja atau lainnya) daripada investasi pendidikan. Mungkin masih dapat diterima jika mengacu pada masyarakat yang kurang mampu.

Pendidikan sendiri telah didefinisikan sebagai sebuah upaya yang direncanakan untuk mendirikan suatu lingkungan belajar dan proses kegiatan pendidikan sehingga siswa secara aktif dapat mengembangkan/ potensinya yang ada pada dirinya sendiri untuk mendapatkan tingkat religius dan spiritual,



kesadaran, kepribadian, kecerdasan, perilaku dan kreativitas untuk dirinya sendiri, lainnya warga negara dan untuk bangsa. Konstitusi juga telah mencatat kalau pendidikan di Indonesia secara garis besar telah dibagi menjadi dua bagian yaitu pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya pendidikan formal juga masih dibagi lagi menjadi tiga level yaitu, tingkat primer, sekunder dan pendidikan tinggi.

Sebagai langkah awal kebijakan PMU, siswa SMA/SMK juga bakal mendapat kucuran dana bantuan operasional sekolah seperti yang selama ini diberikan kepada siswa jenjang pendidikan dasar. Menurut Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta "Dalam beberapa tahun ke depan, kenaikan anggaran pendidikan nasional cukup tinggi. Untuk BOS pendidikan dasar tahun 2012 sudah terpenuhi. Jadi, pemerintah mulai merintis BOS untuk SMA/SMK/MA agar wajib belajar 12 tahun terwujud". Menurut mantan rektor ITS, rintisan BOS untuk SMA/SMK/MA ini harus dimulai karena sampai tahun 2014 salah satu fokus kebijakan pendidikan nasional adalah mengatasi masalah keterjangkauan. Pendidikan di jenjang SMA/SMK dirasakan masih sulit dijangkau karena masalah biaya sekolah. Hal ini, terlihat dari angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah tahun 2009/2010 yang baru mencapai 69,6 persen. Jika wajib belajar 12 tahun telah siap, pemerintah akan menetapkan usia wajib belajar hingga SMA/SMK/MA. Untuk pendidikan dasar, usia wajib belajar ditetapkan 7-15 tahun.

### **2.1.5.5. Konsep PMU di Indonesia**

Salah satu kebijakan pemerintah berupa Penyiapan Pendidikan Menengah Universal yang direncanakan akan berlaku mulai tahun 2013 sebagaimana sambutan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hari Pendidikan 2 Mei 2012. Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Menteri M. Nuh menyampaikan terdapat bonus demografi untuk Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2035. Artinya, sepanjang rentang tahun ini terdapat kumpulan peserta didik usia yang potensial dan produktif. Pada periode ini pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya menyiapkan generasi 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Untuk itu, perluasan akses seluas-luasnya perlu diberikan kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

Dasar hukum pelaksanaan PMU di Indonesia sebagaimana yang tercantum pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 11 ayat (1) bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya, pada pasal 17 ayat (1) disebutkan pula bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan ayat (2) bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut menunjukkan

bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Program pendidikan menengah universal tidak jauh beda dengan program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Setelah sekian lama program wajib belajar 9 tahun berjalan, akhirnya akan diimplementasikan program wajib belajar 12 tahun. Dalam bahasa yang singkat pemerintah telah membuat kebijakan yaitu mewajibkan pendidikan bagi peserta didik minimal sampai pada tingkatan sekolah menengah, baik itu SMA/MA ataupun SMK. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar; (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah (sebelumnya dikenal dengan sebutan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA) adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.

Pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh sekolah menengah atas (SMA) (sempat dikenal dengan "sekolah menengah umum" atau SMU) atau madrasah aliyah (MA). Sedangkan pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan oleh sekolah menengah kejuruan (SMK) atau madrasah aliyah kejuruan (MAK). Pendidikan menengah kejuruan dikelompokkan dalam bidang kejuruan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha.

Gagasan program Pendidikan Menengah Universal tersebut dilandasi kesadaran pemerintah untuk jumlah lulusan SMA/MA atau SMK dan yang sederajat di segenap penjuru di tanah air. Dengan program pendidikan menengah universal, diharapkan lulusan SMA/MA atau SMK semakin meningkat sehingga secara usia dan kompetensi mampu bersaing di dunia kerja. Intervensi pemerintah pusat dalam pendidikan dilakukan untuk mengurangi Angka Drop Out dan meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik SMA. Mencermati kondisi tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menempatkan Pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 tahun sebagai agenda yang harus dilaksanakan mulai tahun 2013.

Lebih lanjut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, program Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun. Disebut rintisan karena hingga saat ini, wajib belajar 12 tahun belum menjadi amanat undang-undang seperti halnya pendidikan dasar 9 tahun. Untuk itu, Pemerintah pun segera menyiapkan rancangan untuk amandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) untuk melandasi perubahan wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun. PMU dijadikan agenda pembahasan utama dan sudah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah setelah disinggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-67 di gedung parlemen pada 16 Agustus 2012. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah bersama DPR akan menyusun anggaran untuk menjalankan program tersebut.

### **2.1.6. Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan**

Peranan pemerintah dalam pendidikan merupakan upaya untuk mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan pendidikan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan agar warga negara memiliki pengetahuan dan keterampilan, kepandaian, kesadaran akan tugas dan kewajiban serta memiliki jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurut Elfindri (2001), di negara sedang berkembang pemerintah ikut berperan dalam manajemen pendidikan, hal tersebut didasari atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Pendidikan memerlukan pembiayaan yang berarti memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, yakni mengecap pendidikan.
2. Pendidikan merupakan public goods.
3. Tidak semua masyarakat mampu untuk mendapatkan pendidikan.

Elfindri (2001) menyatakan bahwa dalam pembiayaan pendidikan harus diperhatikan prioritas pembiayaan pendidikan seperti pembiayaan pembangunan gedung sekolah. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan sangat tergantung kepada fasilitas-fasilitas fisik apa saja yang belum tersedia. Kondisi demikian yang juga mempengaruhi struktur pembiayaan pendidikan.

Namun pembiayaan pendidikan tidak dapat hanya disandarkan melalui anggaran pemerintah yang tertuang dalam APBD/APBN. Usaha-usaha untuk mencari alternatif pembiayaan pendidikan melalui peran serta rumah tangga dan pihak swasta akan semakin diperlukan dimasa yang akan datang.

Peranan pemerintah diperlihatkan dari seberapa besar subsidi yang diberikan kepada anak-anak sekolah. Peranan itu dapat juga dinyatakan dengan angka yang menunjukkan seberapa besar proporsi pembiayaan pendidikan yang berasal dari pendapatan domestik setiap tahunnya (Elfindri,2001:96).

Menurut Suparmoko (2000), jika kita melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, tampak bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di dalam semua macam sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran yang bersangkutan.

Adapun indikator dari peran pemerintah adalah: (Suparmoko, 2000:46)

1. Proporsi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi untuk pembiayaan pendidikan dasar
2. Proporsi anggaran yang dilaokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembiayaan pendidikan dasar
3. Item-item pembiayaan pendidikan dasar

Menyangkut anggaran pendidikan akan menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah benar-benar menempatkan investasi sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam meningkatkan daya saing di era global yang sangat kompetitif seperti sekarang. Namun, jika pendidikan berhasil ditingkatkan, pertanyaan berikutnya akan muncul yaitu apakah kenaikan anggaran pendidikan yang tiba-tiba tidak akan melahirkan eksekusi yang buruk, terutama dilihat dari efisiensi penggunaannya. Ini belum lagi ketika lihat realitas akan masih tingginya angka korupsi yang sangat kronis bagi bangsa ini.

Pembiayaan berkaitan erat dengan pemerataan pendidikan dan perluasan akses, karena hal tersebut merupakan salah satu agenda pendidikan, disamping pengupayaan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya pemerataan pendidikan, yaitu: (Bappenas, dalam Elfindri, 2008;88)

1. Akses untuk memperoleh pendidikan yang layak belum dapat dirasakan di semua daerah karena tempat tinggal yang jauh dari fasilitas publik, apalagi daerah yang terpencil (seperti di Kecamatan Palupuh dan Kecamatan Palembang dimana penelitian dilakukan oleh Elfindri) .
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, kelas, bangku dan tenaga pendidik. Kadang-kadang terjadi ketimpangan antara rasio guru dan murid.
3. Ketimpangan distribusi guru dan ketimpangan kompetensi guru pada seluruh level dan jenjang pendidikan. Artinya pemerataan ketersediaan

guru yang berkualitas untuk menjamin tercapainya pemerataan pendidikan.

4. Beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa, seperti biaya transportasi, SPP dan beban lainnya.

#### **2.1.6.1. Peran Pemerintah Terhadap PMU**

Pemberdayaan pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya secara bertanggung jawab melalui penerapan ketatapemerintahan yang baik merupakan pilihan instrumentasi nasional guna mewujudkan suatu idealisme. Dengan demikian, diharapkan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kebernegeraan Indonesia mengalami perubahan kemajuan yang cepat dan meningkat kualitasnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, dalam suatu ketetapan regulasi nasional berbentuk desentralisasi.

Desentralisasi pendidikan merupakan pelimpahan urusan pendidikan nasional secara luas kepada pemerintah kabupaten atau kota dan secara parsial terbatas kepada provinsi, sebagaimana hal-hal itu diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta ketentuan perundang-undangan turunannya. Regulasi ini sesungguhnya dianggap sebagai keniscayaan tetapi dimaksudkan secara mulia untuk peningkatan mutu proses dan luaran pendidikan melalui upaya mendekatkan layanan pendidikan dengan komitmen dan tanggung jawab yang



tinggi dan merata dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan baik di daerah maupun di pusat.

Seiring dengan isu desentralisasi tersebut maka perlu ada pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan PMU 12 tahun. Pembagian peran inilah yang pada akhirnya akan menyukseskan program pencerdasan dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah.

#### **2.1.6.2. Peran Pemerintah Pusat Terhadap PMU**

Peran pemerintah pusat adalah :

1. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan (guru)

Desentralisasi pendidikan menempatkan guru sebagai penjamin mutu pendidikan belum sepenuhnya murni berkiprah dalam profesinya. Oleh karena itu, pengelolaan guru perlu dilakukan secara terpusat mulai dari pengadaan, pengangkatan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan karier. Pemerintah pusat dapat berperan dalam pengembangan kapasitas guru dalam rangka pemerataan pendidikan di Indonesia.

2. Kurikulum

Pengembangan kurikulum pendidikan harus memuat empat pilar kebangsaan secara tersirat dalam setiap bidang studi, yakni Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kebijakan pengelolaan kurikulum harus bersifat terpusat atau menjadi kewenangan pemerintah.

#### **2.1.6.3. Peran Pemerintah Provinsi terhadap PMU**

Peran pemerintah provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi diharapkan memiliki kewenangan dalam perizinan bagi pembukaan sekolah kejuruan (SMK), pendidikan khusus, dan layanan khusus.
2. Dalam pembinaan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dan pemerataan mutu menjadi kewenangan provinsi.
3. Dalam hal penyaluran pendanaan untuk sekolah guna menghindari penyalahgunaan pemfungsian perlu menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

#### **2.1.6.4. Peran Pemerintah Kabupaten dan Kota terhadap PMU**

Peran pemerintah kabupaten dan kota yaitu:

1. Penyediaan sarana dan prasarana.
2. Pengendalian mutu,
3. Pengelolaan pendidikan,
4. Kurikulum,
5. pembiayaan,
6. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan (guru)
7. perizinan, dan
8. pendanaan.

#### **2.1.7. Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang menjadi acuan dalam perencanaan program pada masing-masing daerah. Pelayanan pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan diatur dalam Permendiknas No. 129a/U Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah Kabupaten/ Kota Pasal 4 ayat 1 -2 sebagai berikut :

(1) SPM Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)

terdiri atas :

- a. 60 persen anak dalam kelompok usia 16 – 18 tahun bersekolah di SMA/MA dan SMK.
- b. Angka Putus Sekolah (APtS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah.
- c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.
- d. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya.
- e. 90 persen dari jumlah guru SMA/MA yang diperlukan terpenuhi.
- f. 90 persen guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
- g. 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran.
- h. Jumlah siswa SMA/MA per kelas antara 30 – 40 siswa

(2) SPM Pendidikan SMK terdiri atas :

- i. Angka Putus Sekolah (APtS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah.

- j. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.
- k. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya.
- l. 90 persen dari jumlah guru SMK yang diperlukan terpenuhi.
- m. 90 persen guru SMK memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
- n. 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran.
- o. Jumlah siswa SMK per kelas antara 30 – 40 siswa.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mencoba mengungkap pendidikan menengah universal 12 tahun dan pendidikan vokasi sebagai lompatan yang signifikan dalam menyongsong generasi emas di Indonesia. Penelitian sebelumnya mencoba memaparkan sasaran PMU agar pada tahun 2020 APK 97 persen dapat dicapai serta pelayanan pendidikan vokasi dapat ditingkatkan.

Adapun penelitian terdahulu yang di gunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dwi Hidayati, dkk, 2014, Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun dan Pendidikan Vokasi Sebagai Lompatan Signifikan Dalam Menyongsong Generasi Emas Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan kepada pemerintah agar peningkatan SDM melalui proses pendidikan harus mendapatkan perhatian lebih. Metode yang di pakai oleh peneliti adalah menganalisis proses pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan menengah melalui program PMU. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa program PMU dinilai cukup membantu dalam peningkatan pendidikan khususnya pendidikan menengah.

2. Wiko Saputro, dkk, 2004, Pembiayaan Pendidikan Indonesia Menuju Millenium Development Goals (MDGs) 2015.

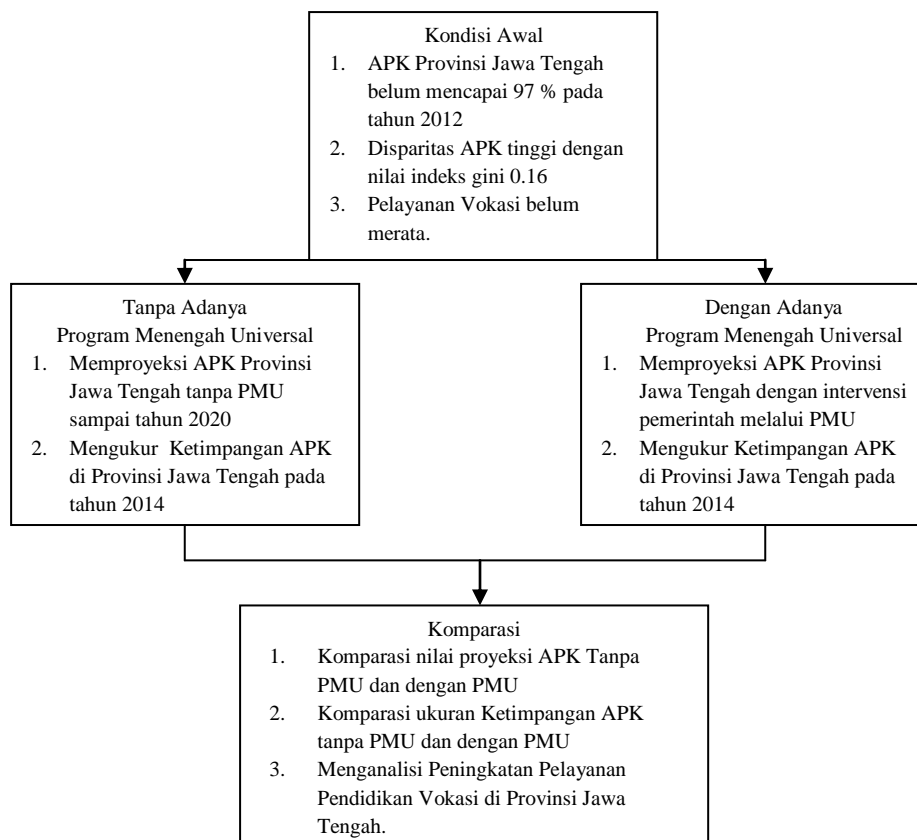
Penelitian ini menemukan bahwa hampir 70-80 persen pembiayaan pendidikan ditanggung oleh rumah tangga. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil kontribusi pemerintah dalam pembiayaan pendidikan. Terbukti bahwa sebagian subsidi pemerintah terserap untuk anggaran rutin terutama pembayaran gaji sebesar 93 persen dan sisanya untuk biaya pembangunan. Sedangkan biaya yang ditanggung oleh rumah tangga sebagian besar terserap oleh biaya tidak langsung untuk uang saku dan ongkos transportasi peserta didik. Hasil estimasi anggaran yang dilakukan Wiko Saputra, dkk (2004) menunjukkan bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran sebesar Rp 70 triliun dengan target pada tahun 2015, semua anak usia 7-18 tahun dapat mengakses pendidikan.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Program Menengah Universal dapat dikatakan berhasil apabila mencapai 3 (tiga) sasaran dari PMU yaitu, (1) APK mencapai 97 persen pada tahun 2020 (2) Disparitas antar kota di Provinsi Jawa Tengah semakin kecil (3) Pelayanan pendidikan vokasi dapat di tingkatkan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Untuk mengetahui apakah APK Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai 97 persen maka digunakan analisis proyeksi untuk mengetahui berapa besar APK di Jawa Tengah. Memperkecil disparitas antar daerah kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan pengukuran Kurva Lorenz dan Peningkatan Pelayanan Vokasi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menggunakan metode *Matematik* dengan alat analisis *geometrik* yang didukung data *kuantitatif*. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kualitas pendidikan tanpa PMU dan dengan intervensi pemerintah melalui PMU di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana program PMU dituntut harus bekerja keras dalam pelaksanaan program PMU. Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai intervensi dalam menggapai dari tujuan PMU itu sendiri. Perencanaan pendidikan dengan memprediksi jumlah siswa pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan apa saja yang harus disediakan pemerintah dan sudah sejauh apa tingkat keberhasilan Program Menengah Universal tercapai.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jumlah siswa SM, yaitu jumlah siswa yang duduk ditingkatan jenjang pendidikan menengah SMA, MA dan SMK berapapun usianya.

Informasi mengenai perkiraan jumlah siswa akan memudahkan dalam memproyeksi APK sesuai dengan tujuan dari PMU.

2. Penduduk Usia Sekolah, adalah jumlah penduduk suatu daerah pada jenjang umur tertentu yaitu jenjang pendidikan menengah usia 16 – 18 tahun. Komponen perhitungan yang digunakan meliputi jumlah penduduk pada usia jenjang pendidikan menengah yaitu berusia 16 -18 tahun. Penduduk Usia Sekolah merupakan indikator dalam mencari nilai APK pada suatu daerah.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK), merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK juga merupakan salah satu indikator pencapaian dari tujuan PMU dan indikator untuk melihat seberapa berhasil suatu daerah dalam melaksanakan program pendidikan dan untuk mengetahui ketimpangan pendidikan antara daerah satu dengan daerah yang lain.
4. Disparitas APK, merupakan ukuran ketimpangan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan penyerapan penduduk usia sekolah antar wilayah melalui perhitungan Kurva Lorenz. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan data Penduduk Usia Sekolah dan Jumlah Siswa dalam kaitannya APK. Apabila Kurva Lorenz semakin mendekati garis Equality, maka kesenjangan yang



semakin kecil dan apabila Kurva Lorenz semakin menjauhi garis Equality maka menunjukkan kesenjangan yang makin melebar.

5. Angka Putus Sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD,SLTP,SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APtS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Dengan mengetahui tingkat angka putus sekolah kita dapat melihat apakah sekolah, daerah, direktorat/departemen pendidikan tersebut mempunyai kualitas.
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM), merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang menjadi acuan dalam perencanaan program pada masing-masing daerah. Pelayanan pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain ; Kondisi ruang kelas, ketersediaan ruang kelas, ketersediaan buku pelajaran, ketersediaan ruang laboratorium, ketersediaan laboratorium computer, ketersediaan guru, klasifikasi guru layak mengajar.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, literature, internet, catatan-catatan, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Anton Dajan (1991) yang

dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data Angka Partisipasi Kasar Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012.
- b. Data Angka Putus Sekolah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012.
- c. Data Penduduk Usia Sekolah Provinsi Jawa Tengah usia 16-18 tahun 2010-2012.
- d. Data Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012.
- e. Data Statistik Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2010-2012.

Adapun data yang digunakan adalah data di Provinsi Jawa Tengah dan data di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk tahun 2010-2012. Data ini merupakan kumpulan informasi mengenai ke enam variabel penelitian di semua 35 Kabupaten/Kota di Jawa tengah dalam kurun waktu tiga tahunan.

### **3.3. Metode Analisis**

Proyeksi penduduk dapat dibuat untuk mengetahui keadaan penduduk pada masa depan (*forward projection*) atau keadaan penduduk pada masa lalu (*backward projection*). Ada dua metode proyeksi penduduk, yaitu metode matematik (*mathematical method*) dan metode komponen (*component method*) (Sri Moertiningsih, A dan Omas Bulan Samosir, 2011)

#### **3.3.1. Metode Matematik**

Metode matematik (*mathematical method*) digunakan kalau data tentang komponen pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi, tidak

diketahui sehingga data yang digunakan sebagai dasar membuat proyeksi penduduk hanyalah jumlah penduduk total. Ada tiga metode proyeksi penduduk dengan menggunakan metode matematik, yaitu aritmatika, geometrika, dan eksponensial.

#### 1. Metode Aritmatika

Perkiraan penduduk pada masa depan dengan metode aritmatik (*arithmetic rate of growth*) mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada masa depan akan bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahun. Berikut ini adalah rumus metode aritmatik :

$$P_n = P_o ( 1 + r n ) \dots\dots\dots$$

(3-1)

Dimana :

$P_n$  = jumlah penduduk pada tahun  $n$

$P_o$  = jumlah penduduk pada tahun awal (dasar)

$r$  = angka pertumbuhan penduduk

$n$  = periode waktu antara tahun dasar dan tahun  $n$  (dalam tahun)

Dari rumus tersebut dapat ditentukan rumus untuk menghitung angka pertumbuhan penduduk secara aritmatik sebagai berikut :

$$P_n = P_o ( 1 + r n )$$

$$(P_n/P_o) = 1 + r n$$

$$(P_n/P_o) - 1 = r n$$

$$r = ((P_n/P_o) - 1) / n$$

..... (3-2)

## 2. Metode Geometrika

Perkiraan penduduk masa depan dengan metode geometric mengasumsikan bahwa jumlah penduduk akan bertumbuh secara geometric menggunakan dasar perhitungan bunga ber bunga (bunga majemuk). Dalam hal ini angka pertumbuhan penduduk (*rate of growth*) dianggap sama untuk setiap tahun. Berikut ini adalah rumus metode geometric :

$$P_n = P_0 (1 + r)^n$$

..... (3-3)

Adapun penentuan rumus angka pertumbuhan penduduk geometric adalah sebagai berikut :

$$P_n = P_0 (1 + r)^n$$

$$(P_n/P_0) = (1 + r)^n$$

$$(P_n/P_0)^{1/n} = 1 + r$$

$$r = (P_n/P_0)^{1/n} - 1$$

..... (3-4)

## 3. Metode Eksponensial

Pertumbuhan penduduk secara geometric mengasumsikan bahwa tambahan penduduk hanya terjadi pada satu saat selama kurun waktu tertentu. Misalnya, pertambahan penduduk dalam satu tahun hanya terjadi pada setiap awal tahun, pertengahan tahun, atau pada akhir tahun saja. Padahal kenyataannya pertambahan penduduk dapat terjadi kapan saja sepanjang tahun. Dengan demikian , diperlukan suatu rumus yang lebih menggambarkan pertambahan penduduk yang terjadi secara sedikit demi sedikit sepanjang tahun. Dalam hal ini,

metode eksponensial lebih tepat digunakan. Berikut adalah rumus metode eksponensial.

$$P_n = P_0 e^{r n}$$

Dimana :

$P_n$  = jumlah penduduk pada tahun  $n$

$P_0$  = jumlah penduduk pada tahun awal (dasar)

$r$  = angka pertumbuhan penduduk

$n$  = periode waktu antara tahun dasar dan tahun  $n$  (dalam tahun)

$e$  = bilangan pokok dari sistem logaritma natural

Adapun penentuan rumus angka pertumbuhan penduduk secara eksponensial adalah sebagai berikut :

$$P_n = P_0 e^{r n}$$

$$(P_n/P_0) = e^{r n}$$

$$\ln (P_n/P_0) = \ln (e^{r n}) = r n$$

$$r = \ln (P_n/P_0) / n$$

Pada Penelitian ini, peneliti memilih menggunakan alat proyeksi menggunakan alat proyeksi *geometrik*. Alat proyeksi ini sering disebut juga dengan alat proyeksi tingkat pertumbuhan penduduk (Growth Rates).

Alat ini menyediakan estimasi dan proyeksi dari total penduduk dengan menggunakan tingkat pertumbuhan penduduk, atau untuk tingkat lanjutnya melalui fitting kurva yang menyajikan gambaran matematis dari perubahan jumlah penduduk, seperti kurva logistik. Proyeksi berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk mengasumsikan pertumbuhan yang konstan, baik untuk

model aritmatika, geometrik, atau eksponensial untuk mengestimasi jumlah penduduk.

Proyeksi APK pada penelitian ini menggunakan metode geometrik yang telah dimodifikasi dengan asumsi bahwa nilai APK akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan jumlah penduduk usia sekolah dan jumlah siswa. Laju pertumbuhan nilai APK (rate of growth) dianggap sama untuk setiap tahun. Berikut formula yang digunakan pada metode geometrik:

$$P_t = P_0 (1+r)^t$$

$$r = \left( \frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$$

dimana: P = APK pada tahun t

P<sub>0</sub> = APK pada tahun awal

r = Laju pertumbuhan APK

t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

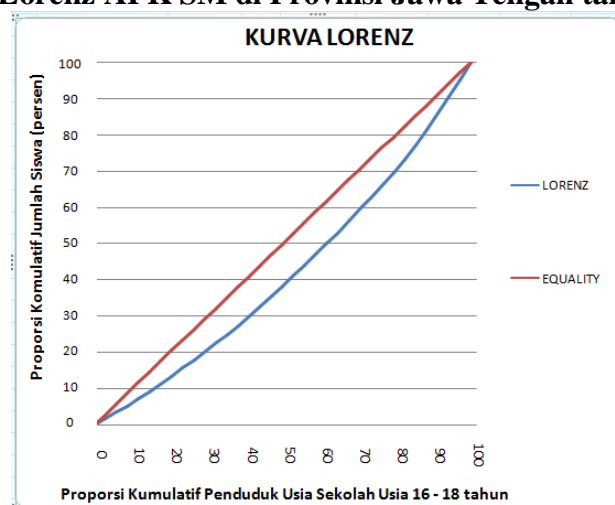
Metode analisis dengan menggunakan alat analisis geometrik ini berasumsi bahwasannya persentase pertumbuhan jumlah siswa dan persentase pertumbuhan penduduk usia sekolah adalah konstan. Oleh sebab itu perhitungan Proyeksi APK pada penelitian ini di asumsikan peningkatan kualitas pendidikan tidak ada intervensi pemerintah dan kemudian dikomparasi dengan peningkatan kualitas pendidikan dengan intervensi pemerintah.

### 3.3.2. Kurva Lorenz

Untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan jumlah siswa SM dengan jumlah penduduk usia sekolah usia 16 – 18 tahun antar wilayah adalah dengan menggunakan perhitungan Kurva Lorenz. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan APK SM yang kaitannya dengan penduduk usia sekolah.

*Kurva Lorenz* menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk usia sekolah usia 16 – 18 tahun dan distribusi jumlah siswa pada jenjang pendidikan menengah. Pada gambar 3.1 sumbu vertikal menunjukkan proporsi komulatif jumlah siswa (persen) dan sumbu horisontal menunjukkan proporsi komulatif penduduk usia sekolah usia 16 – 18 tahun.

**Gambar 3.1**  
**Kurva Lorenz APK SM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012**



Sumber: Profil Pendidikan, Dinas Pendidikan Jawa Tengah 2013. Diolah

Apabila Garis Kurva Lorenz semakin mendekati Garis Equality, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin kecil dan bila garis Kurva Lorenz semakin menjauhi garis Equality maka menunjukkan kesenjangan yang semakin melebar. Jika kurva Lorenz tidak diketahui, maka pengukuran ketimpangan

distribusi pendidikan dapat dilakukan dengan rumus koefisien Gini yang dikembangkan oleh Gini (1912). Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang tertentu dari total jumlah penduduk usia sekolah selama 1 tahun. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal ( yang merupakan garis pemerataan sempurna) maka semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya.

### **3.3.3. Gini Coefficient**

Koefisien Gini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1 yang merupakan rasio antara luas area antara kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna dengan luas area di bawah kurva Lorenz seperti yang nampak pada Gambar 3.1. Jadi koefisien Gini yang rendah meng-indikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya semakin besar koefisien Gini mengindikasikan distribusi yang semakin timpang (senjang) antar kelompok penerima pendapatan. Secara ekstrim diartikan bahwa koefisien Gini sebesar 0 berarti terdapat pemerataan sempurna (setiap orang memperoleh pendapatan yang sama persis) dan koefisien Gini sebesar 1 menunjukkan ketidak-merataan sempurna (di mana satu orang memiliki/menguasai seluruh pendapatan totalnya, sementara lainnya tidak memperoleh pendapatan sama sekali). Sumbu horisontal mewakili jumlah populasi penerima pendapatan dan sumbu vertikal menggambarkan pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk (Todaro, 1981). Garis Kurva Lorenz akan berada di atas garis



horizontal, bila kurva tersebut menjauh dari kurva diagonal maka tingkat ketimpangan akan semakin tinggi.

Nilai gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila nilai gini mendekati satu maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sedangkan semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai gini maka semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Indeks/Rasio Gini merupakan koefisien yang berkisar 0 sampai 1, yang menjelaskan kadar ketimpangan distribusi pendapatan nasional.

Rumus Perhitungan Gini Coefficient :

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i-1} - X_i) (Y_{i-1} + Y_i) \dots\dots$$

GC = Gini Coefficient / Rasio Gini

$f_i$  = Proporsi Jumlah Rumah Tangga dalam kelas t

$X_i$  = Proporsi Jumlah Kumulatif Rumah Tangga dalam kelas t

$Y_i$  = Proporsi Jumlah Kumulatif Pendapatan dalam kelas t

### **3.4. Analisis Keberhasilan Pendidikan Vokasi**

#### **3.4.1. Statistik Deskriptif**

Dalam menjawab tujuan penelitian yang ketiga yaitu dengan teknik analisis statistik deskriptif menggunakan analisis komparasi antara pelayanan pendidikan sebelum di jalankannya PMU dengan pelayanan pendidikan setelah dijalankannya PMU. Dalam meningkatkan pelayan vokasi peneliti menggunakan metode statistik deskriptif dengan menganalisa mutu pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pelayanan mutu pendidikan menengah SM.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan. Dengan menganalisa SPM, ukuran keberhasilan pendidikan pada suatu daerah dapat dilihat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbagi atas dua kategori, yaitu SPM SMA dan SPM SMK.

Untuk menganalisa keduanya, peneliti mengelompokkan sesuai dengan peraturan Permendiknas yaitu membagi SPM menjadi dua kategori, SPM SMA dan SPM SMK. SPM SM merupakan tolak ukur acuan yang digunakan peneliti dalam mengkomparasikan antara pelayanan vokasi sebelum dijalankannya PMU dan sesudah dijalankannya PMU, yang kemudian diukur tingkat keberhasilannya sesuai dengan Permendiknas melalui Standar yang telah ditetapkan pemerintah pada SPM pendidikan menengah.

Dalam menjawab tujuan ketiga dalam penelitian ini, berikut point-point SPM SMA dan SPM SMK yang akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif.

(1) SPM Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)

terdiri atas :

- a. 60 persen anak dalam kelompok usia 16 – 18 tahun bersekolah di SMA/MA dan SMK.
- b. Angka Putus Sekolah (APtS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah.
- c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.

- d. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya.
- e. 90 persen dari jumlah guru SMA/MA yang diperlukan terpenuhi.
- f. 90 persen guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
- g. 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran.
- h. Jumlah siswa SMA/MA per kelas antara 30 – 40 siswa

(2) SPM Pendidikan SMK terdiri atas :

- a. Angka Putus Sekolah (APtS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah.
- b. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional.
- c. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya.
- d. 90 persen dari jumlah guru SMK yang diperlukan terpenuhi.
- e. 90 persen guru SMK memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
- f. 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran.
- g. Jumlah siswa SMK per kelas antara 30 – 40 siswa.

Poin – poin Standar Pelayanan Minimal diatas merupakan tolak ukur acuan standar pelayanan minimal pada jenjang pendidikan menengah. Dengan mengacu pada standar pelayanan minimal, diharapkan kualitas pendidikan menengah yang ada di Indonesia dapat merata dan SDM yang dihasilkan memiliki daya saing baik di dalam maupun luar negeri.